

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu tentang kebijakan dan manajemen publik membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat, serta mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien. Sebagai “*the work of government*” administrasi publik memiliki pengaruh yang sangat penting bagi suatu negara, karena keadaan perekonomian suatu negara sangat bergantung pada dinamika administrasi publik (Karl Polanyi dalam Keban, 2019). Apa yang dilakukan dalam dunia administrasi publik merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, mencakup pemberian layanan kepada masyarakat maupun kegiatan untuk mengejar ketertinggalan masyarakat, melalui berbagai program pembangunan seperti pembangunan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia (Keban, 2019).

Pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan administrasi publik melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan implementasi kebijakan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata suatu daerah. Kegiatan ini mencakup koordinasi lembaga pemerintah, alokasi sumber daya yang efektif dan efisien, serta partisipasi masyarakat lokal sebagai sasaran penerima manfaat ekonomi dari kegiatan pengembangan pariwisata. Dalam hal ini, administrasi publik memainkan peran dalam mengatur regulasi, mendukung infrastruktur, dan melakukan promosi pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus didorong kemajuannya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mengatasi masalah perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi suatu daerah. Pariwisata menjadi sektor padat karya yang di dalamnya mencakup berbagai macam aktivitas ekonomi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa tujuan pariwisata yaitu untuk mencapai kesejahteraan rakyat, memberantas kemiskinan, dan menumbuhkan perekonomian. Oleh karena itu, pengembangan sektor kepariwisataan ini harus terus dilakukan melalui berbagai inovasi baru, agar mampu mendorong terciptanya konsep pariwisata berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang khususnya oleh masyarakat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan suatu komitmen dunia dan nasional untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. SDGs terdiri dari 17 tujuan atau pilar yang akan dicapai di tahun 2030, dan telah disetujui serta disepakati oleh negara-negara yang ada di dunia, termasuk salah satunya Indonesia.



Gambar 1.1 Tujuan SDGs

Sumber: Bappenas (2024)

Tujuan-tujuan yang terdapat dalam SDGs tersebut diantaranya adalah mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka kelaparan, mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih yang terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur industri, mengurangi kesenjangan, kota dan tempat tinggal yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, penanggulangan perubahan iklim, pengelolaan ekosistem laut, pemanfaatan ekosistem darat yang berkelanjutan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, serta kemitraan berkelanjutan untuk merealisasikan tujuan.

Kemajuan di bidang pariwisata menyebabkan pengembangan pariwisata dianggap penting karena mampu berkontribusi dalam peningkatan devisa negara, Pendapatan Asli Daerah, dan membuka peluang atau kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja (Anggitasari & Ahdiyana, 2023). Karakteristik industri pariwisata yang kompleks dan saling bergantung lintas wilayah, menciptakan situasi di mana pengelolaan dan regulasi tidak cukup jika hanya ditangani oleh negara (pemerintah) saja, tetapi juga perlu melibatkan aktor lain yang memiliki kepentingan beragam (Afni, 2022). Agar pengembangan pariwisata di suatu daerah berhasil, maka perlu adanya kerja sama antara para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya (Irene & Sitorus, 2020).

Kerja sama menciptakan adanya hubungan interaksi antar aktor untuk mencapai suatu tujuan. Adanya keterlibatan aktor-aktor dalam pengembangan desa wisata akan mendorong pembentukam suatu jaringan. Sebuah jaringan merupakan kumpulan kompleksitas yang memetakan hubungan yang melibatkan atribut dan

aliran antar individu (Yuniningsih, 2018). Siapa saja aktor yang terlibat, peranan apa saja yang para aktor lakukan, dan bagaimana cara mereka berinteraksi dapat diketahui melalui tahapan jaringan aktor (Nabella et al., 2024). Jaringan aktor akan terbentuk saat ada kesepahaman antara berbagai pihak yang terlibat, dengan cara meyakinkan satu sama lain bahwa mereka memiliki kepentingan yang serupa atau dengan menggabungkan beberapa kepentingan yang berbeda menjadi misi yang baru.

Jaringan aktor dalam pengembangan sebuah wisata berhubungan dengan pilar pertama SDGs, yaitu tanpa kemiskinan. Ada beberapa target yang harus dicapai pada pilar pertama ini, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan kemiskinan paling tidak 50%, penerapan sistem perlindungan sosial yang adil, kesamaan hak atas kepemilikan dan sumber daya ekonomi, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, lingkungan ekonomi, dan sosial, menjamin mobilisasi sumber daya untuk mengentaskan kemiskinan, dan membuat kerangka kerja kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok miskin dan sensitif gender.

Di masa sekarang ini, tantangan serta ketidakpastian yang dihadapi oleh suatu daerah pedesaan telah menjadi hal yang membutuhkan penanganan dari pemerintah (Zhou et al., 2021). Keyim (2018) menyebutkan bahwa permasalahan kompleks yang dihadapi oleh suatu desa yaitu meningkatnya angka pengangguran, banyaknya jumlah penduduk berumur tua karena tingkat migrasi keluar yang tinggi, dan minim atau terbatasnya fasilitas pelayanan publik di pedesaan. Hal inilah yang melatarbelakangi sektor pariwisata dijadikan sebagai *power* baru untuk menciptakan perekonomian masyarakat melalui upaya kerja sama antar aktor,

dalam merencanakan dan melaksanakan sektor pariwisata (Saputra, 2023) khususnya di daerah pedesaan.

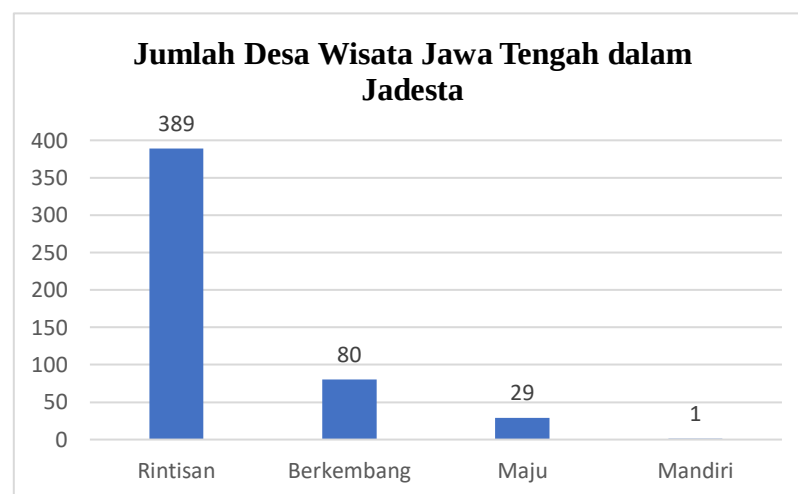
Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama di beberapa wilayah di Indonesia, melalui target terakhir pada pilar pertama SDGs, yaitu membuat kerangka kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok miskin dan sensitif gender. Hal tersebut karena kebijakan mengenai desa wisata yang dibuat oleh para pemangku kepentingan merupakan solusi untuk menciptakan pembangunan yang memprioritaskan kelompok miskin, dan memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan di suatu daerah (Nabella et al., 2024). Berkembangnya desa wisata mampu merangsang adanya pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat desa menjadi lebih berdaya dan mandiri dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh desa. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat pedesaan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023, menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu aspek yang menjadi urusan wajib pemerintah. Adanya pergeseran paradigma dalam membangun desa yang memposisikan desa sebagai subjek pembangunan, mempunyai tujuan agar desa dapat memaksimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai lokalnya dalam aspek ekonomi, pariwisata, budaya, sosial, dan lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat memiliki peranan yang sangat krusial dalam membangun sebuah wilayah. Dalam hal ini, masyarakat akan aktif terlibat dan memiliki inisiatif untuk

menjalankan kegiatan perekonomian maupun sosial, untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi hidup mereka.

Desa wisata merupakan kesatuan dari potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan wisata buatan yang dimiliki oleh suatu desa tertentu, yang ditunjang oleh adanya akomodasi dan fasilitas sesuai dengan kearifan lokal masyarakat desa. Jika dikelola dengan mumpuni, jenis pariwisata ini mampu memberikan dampak langsung pada ekonomi lokal, mengurangi tingkat kemiskinan, menghambat laju urbanisasi, dan tersedianya lapangan kerja yang berdampak pada berkurangnya angka pengangguran (Saputra, 2023).

Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah desa wisata di Jawa Tengah yang terdaftar dalam Jadesta (Jaringa Desa Wisata) sebanyak 499 desa. Desa wisata ini terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.

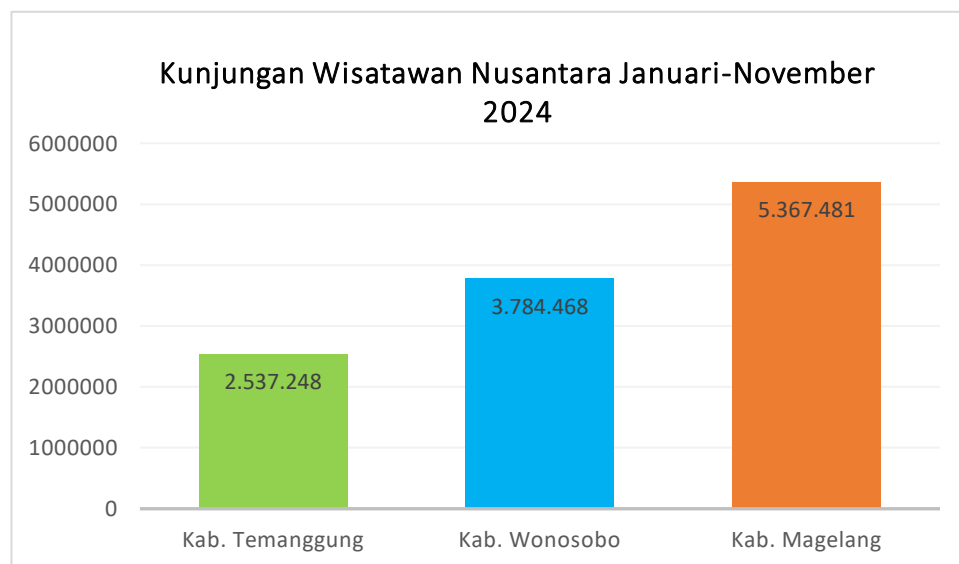


Grafik 1.1 Jumlah Desa Wisata Jawa Tengah dalam Jadesta Tahun 2024

Sumber: Jadesta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2024)

Desa wisata rintisan merupakan desa wisata yang baru dimulai pengoperasiannya, dan masih terbatas lingkupnya. Yang termasuk dalam kategori desa wisata berkembang adalah desa yang sudah stabil dan mempunyai struktur kepengurusan yang jelas, sedangkan desa wisata dengan kategori maju merupakan desa yang telah berperan aktif dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan sekitarnya. Kategori tertinggi desa wisata menurut klasifikasi Kemenparekraf adalah desa wisata mandiri, yaitu ketika kondisi desa memiliki jumlah pengunjung yang banyak dan lingkup yang lebih luas.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah desa wisata rintisan menjadi desa wisata yang paling banyak jumlahnya. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata perlu dilakukan secara masif untuk meningkatkan klasifikasi desa wisata dari desa wisata rintisan menjadi desa wisata maju atau mandiri.



Grafik 1.2 Kunjungan Wisatawan di Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo dan Kab. Magelang (2024)

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (diolah peneliti, 2024)

Jumlah wisatawan dalam negeri atau nusantara di Kabupaten Temanggung masih cukup jauh jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang sebagai daerah terdekat dari Kabupaten Temanggung. Hal tersebut tentu terjadi karena masing-masing daerah di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang memiliki destinasi wisata unggulan yang sejak lama sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan dan telah memiliki *branding* yang cukup baik. Namun apabila dilihat dari segi geografis, yaitu letak Kabupaten Temanggung yang berada di antara 2 gunung besar Sindoro dan Sumbing, seharusnya Kabupaten Temanggung juga dapat diperhitungkan sebagai destinasi tujuan wisata. Peran pemerintah bersama masyarakat, dan kerja sama dengan aktor-aktor lain sangat penting untuk menciptakan inovasi demi kemajuan pariwisata Kabupaten Temanggung.

Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menandatangani kesepakatan bersama dengan Badan Pelaksana Otoritas Borobudur (BPOB) untuk ikut serta dalam menyokong program percepatan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kawasan wisata Borobudur. Sebagai salah satu daerah pendukung, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinbudpar gencar membangun, mengembangkan, dan mendukung potensi wisata pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal, melalui pengembangan desa wisata.

Melalui program tersebut, desa-desa di Kabupaten Temanggung yang berpotensi menjadi destinasi wisata akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap. Dengan begitu, Kabupaten Temanggung yang pada

mulanya hanya dijadikan sebagai tempat transit para wisatawan yang ingin berpergian ke Dieng (Wonosobo) dan Candi Borobudur (Magelang), kini diharapkan bisa menjadi daerah tujuan bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara, dan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah Kabupaten Temanggung menjadi setara dengan daerah di dekatnya.

Tabel 1.1 Jumlah Desa Wisata Kabupaten Temanggung

No	Nama Desa Wisata	Nama Desa	Kecamatan
1	Liyangan	Purbosari	Ngadirejo
2	Dewi Era Maya	Ngropoh	Kranggan
3	Trah Aji	Traji	Parakan
4	Cepag	Pagergunung	Bulu
5	Banyu Suci	Tegalrejo	Ngadirejo
6	Pusar Bumi	Soropadan	Pringsurat
7	Masjid Wali & Makam Kyai Pahing	Menggoro	Tembarak
8	Curug Surodipo	Tawang Sari	Wonoboyo
9	Makukuhan	Makukuhan	Kedu
10	Tlahab	Tlahab	Kledung
11	Pluralisme	Getas	Kaloran
12	Rejosari	Rejosari	Bansari
13	Tlogowero	Tlogowero	Bansari
14	Mranggen Kidul	Mranggen Kidul	Bansari
15	-	Tegowanuh	Kaloran
16	Tuk Mulyo	Pandemulyo	Bulu
17	Wagir Bawang	Simper	Tretep
18	Prangkakan	Prangkakan	Bejen
19	Ngadimulyo	Ngadimulyo	Kedu
20	Muncar Moncer	Muncar	Gemawang
21	Bumi Makukuhan	Wonosari	Bulu
22	Petarangan	Petarangan	Kledung
23	Giripurno	Giripurno	Ngadirejo
24	Bansari	Bansari	Bansari
25	Gedongsari	Gedongsari	Jumo
26	Kaloran	Kaloran	Kaloran

27	Kembang Sari	kembang sari	Kandangan
28	Kampung Mbako	Tlilir	Tlogomulyo
29	Giyono	Giyono	Jumo
30	Gunung Gempol	Gunung Gempol	Jumo
31	Kledung	Kledung	Kledung

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Temanggung (2024)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinbudpar Kabupaten Temanggung, jumlah desa wisata yang resmi memiliki SK (Surat Keputusan) Bupati Temanggung hingga saat ini sebanyak 31 desa. Mayoritas desa wisata ini masih berada di tahap rintisan dan berkembang, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut agar desa tersebut bisa menjadi desa wisata yang maju dan mandiri. Namun sayangnya, dari total jumlah 31 desa wisata ber-SK yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung, hanya terdapat 7 desa wisata saja yang terdaftar di Jadesta. Hal ini menunjukkan masih kurang kesadaran dan bersedianya para pengelola desa wisata untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa wisatanya, salah satunya dengan mengikuti Anugerah Desa Wisata (ADWI). Desa wisata yang terdaftar dalam Jadesta memiliki kesempatan untuk mengikuti ADWI, atau acara penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi desa wisata yang memenuhi kriteria penilaian Kemenparekraf. Adanya Jadesta mampu membantu desa wisata untuk lebih dikenal oleh masyarakat secara luas.

Salah satu desa wisata yang terdaftar dalam Jadesta Kemenparekraf adalah Desa Wisata Muncar Moncer yang berada di kawasan Desa Muncar, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Desa ini mulai berada pada klasifikasi desa wisata maju pada tahun 2022. Konsep yang dimiliki oleh Desa Wisata Muncar Moncer adalah konsep desa wisata yang berkelanjutan (*ecotourism*), dengan

mengunggulkan potensi yang ada di daerah Muncar, yaitu komoditas kopi, kondisi alamnya, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Desa Wisata Muncar Moncer diinisiasi oleh pendamping desa (*local champion*) dari PT Astra International Tbk yang memainkan peran sebagai fasilitator pada program Desa Sejahtera Astra (DSA). Awal mula dari adanya pengembangan desa wisata ini yaitu fasilitator melihat bahwa terdapat potensi yang baik dari komoditas yang dimiliki desa, yaitu kopi apabila dikelola dengan mumpuni. Ia menyayangkan kondisi Desa Muncar dengan potensi komoditas kopi yang kaya, tetapi tidak dimaksimalkan dengan baik karena tidak adanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya. Hal ini karena banyak pemuda-pemudi yang seharusnya jadi penggerak atau agen perubahan di Desa Muncar, memutuskan untuk tidak kembali ke desa selesai mereka menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Awal mula kolaborasi pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer adalah melalui pemberdayaan petani kopi pada tahun 2018, lalu pada tahun 2020 mulai berfokus pada sektor pariwisata.

Tabel 1.2 Potensi Desa Wisata Muncar Moncer

No	Nama Potensi	Penjelasan
1	Bukit Mbelang	Tempat untuk melihat hamparan alam dan lereng bukit di sekitar pemukiman penduduk
2	Curug Lawe	Curug atau air terjun yang memadukan 2 konsep wisata, yaitu wisata air dan <i>hiking</i>
3	Jembatan Gantung	Menikmati keindahan sungai yang besar. Wisatawan juga bisa bermain air dan memandikan kerbau
4	Jembatan Sawah Gumuk	Menyajikan keindahan alam persawahan yang membentang luas dengan desain destinasi wisata seperti di Pulau Bali

No	Nama Potensi	Penjelasan
5	Pendopo Mina Padi	Gazebo di sekitar kolam ikan dan persawahan. Pengunjung dapat menangkap dan mengolah ikan
6	Unit Pengolah Hasil	Tempat untuk mengolah hasil alam seperti kopi dan aren. Pengunjung dapat melihat cara pengolahannya
7	Homestay	Akomodasi bagi para wisatawan yang ingin bermalam di Desa Wisata Muncar Moncer
8	Jeep Tour	Fasilitas untuk wisatawan yang ingin mengelilingi desa
9	<i>Creative Hub</i>	Tempat para pemuda Desa Muncar bertukar pikiran, ide, dan gagasan mengenai pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer

Sumber: Muncar Moncer (2024)

Dari yang awalnya hanya berfokus pada pemberdayaan petani untuk mengolah dan menghasilkan kopi yang baik serta berkualitas, kini Desa Muncar memiliki beberapa spot wisata yang terus mengalami perkembangan. Hal ini tidak lepas dari peran serta hubungan kerja sama antar aktor yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan desa wisata Muncar Moncer.

Sebagai upaya untuk mewadahi desa-desa yang berpotensi seperti Desa Muncar, pemerintah Kabupaten Temanggung mengeluarkan Peraturan Bupati Temanggung No 95 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, sebagai pedoman dalam menetapkan, mengelola, membina dan mengawasi keberlangsungan desa wisata, serta sebagai jaminan hukum dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata yang tertuang dalam regulasi ini mencakup pengembangan infrastruktur desa wisata, pemasaran desa wisata, penguatan kelembagaan desa wisata, dan kerjasama kemitraan.

Pengembangan infrastruktur desa wisata ini meliputi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di lokasi wisata, pembangunan infrastruktur untuk UMKM desa, pembangunan infrastruktur transportasi dan jaringan komunikasi, serta pembangunan infrastruktur lain yang dibutuhkan. Beberapa fasilitas seperti ketersediaan listrik, jaringan internet, tempat ibadah, lahan parkir, pusat informasi desa wisata, dan akomodasi telah dibangun di Desa Wisata Muncar Moncer ini. Namun masih ada beberapa fasilitas penting yang belum dapat terpenuhi di Desa Wisata Muncar Moncer. Hal ini sesuai dengan penilaian desa wisata yang dilakukan oleh Kemenparekraf.

Tabel 1.3 Fasilitas Desa Wisata Muncar Moncer

No	Fasilitas	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Sangat Terpenuhi
1	Sanitasi dan Kebersihan	✓		
2	Layanan Jaringan Telekomunikasi dan Internet		✓	
3	Penyediaan Akomodasi <i>Homestay</i>			✓
4	Jasa Transaksi dan Keuangan	✓		
5	Penyediaan Fasilitas Penyandang Kebutuhan Khusus, Anak-Anak, dan Orang Tua	✓		

Sumber: jadesta.kemenparekraf.go.id (2024)

Pemasaran desa wisata dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan partisipasi semua *stakeholders* melalui berbagai sarana dan media pemasaran. Sarana dan media tersebut meliputi media sosial, *website* resmi, pemberitaan tertulis, dan media lainnya. Pemasaran ini dilakukan dengan membangun citra daerah sebagai desa wisata yang berdaya saing. Pemasaran Desa

Wisata Muncar Moncer dilakukan melalui beberapa platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok dan melalui *website* resmi , yaitu <https://muncarmoncer.com/index.html>.

Pengembangan desa wisata melalui penguatan kelembagaan desa wisata dilaksanakan dengan mengembangkan kapasitas organisasi desa wisata. Dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, lembaga desa wisata yang aktif dalam melakukan pengembangan desa wisata adalah Pokdarwis Muncar Moncer. Kerja sama kemitraan dalam pengembangan desa wisata dilakukan oleh pengelola desa wisata (Pokdarwis) dengan pihak lain, yaitu PT Astra *International* Tbk, melalui program Desa Sejahtera Astra (DSA), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, dan Pemerintah Desa Muncar.

Permasalahan dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung adalah belum kuatnya jejaring antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya aktor yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling terintegrasi antara satu aktor dengan aktor lainnya, sehingga pengembangan dan pengelolaan objek wisata belum dapat dikatakan optimal. Pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer masih gencar dilakukan dengan mengikutsertakan aktor-aktor lain, seperti pemerintah, swasta, dan komunitas masyarakat.

Pada awal proses kolaborasi antar aktor dalam pengembangan desa wisata Muncar Moncer, terdapat dua Pokdarwis yang terbentuk dalam Desa Wiasta

Muncar Moncer. Pokdarwis tersebut bernama Pokdarwis Lawe Asri dan Pokdarwis Muncar Moncer. Namun kedua Pokdarwis ini tidak saling terintegrasi atau berjalan sendiri-sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoga Aldi Syahputra (2023) dengan judul “Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus di Desa Muncar Moncer, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung” menyatakan bahwa pokdarwis Lawe Asri ini dibentuk oleh pemerintah desa tanpa adanya proses yang mendalam dan hanya dibentuk untuk memenuhi kepentingan suatu pihak. Alhasil, Pokdarwis Lawe Asri ini hanya bisa bertahan satu tahun saja. Keberadaan dan keterlibatan BUMDes Desa Muncar dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer ini dinilai belum maksimal karena dianggap kurang kompeten dan kurang responsif. Hal ini juga ditunjukkan pada penilaian Desa Wisata Muncar Moncer yang dilakukan oleh Kemenparekraf.

Tabel 1.4 Kelembagaan Desa Wisata Muncar Moncer

No	Kelembagaan	Kurang Terpenuhi	Terpenuhi	Sangat Terpenuhi
1	Organisasi pengelola desa wisata		✓	
2	Struktur organisasi pengelola desa wisata (Pokdarwis)			✓
3	Keterlibatan BUMDes dalam pengelolaan desa wisata	✓		
4	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata		✓	

Sumber: jadesta.kemenparekraf.go.id (2024)

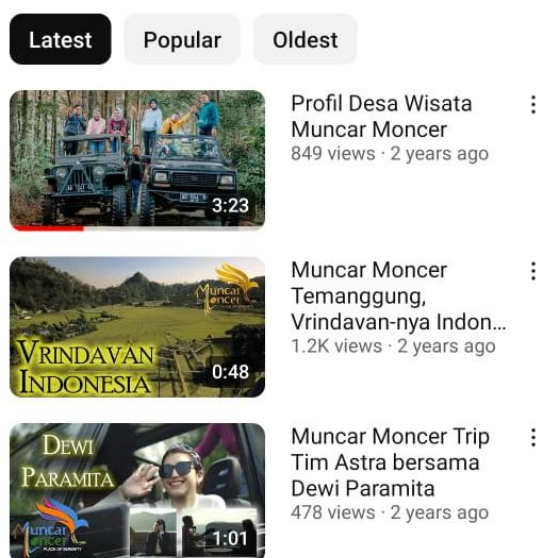
Adanya permasalahan yang ditunjukkan oleh para aktor tersebut mengindikasikan bahwa tahap *problematicization* dalam pengembangan Desa

Wisata Muncar Moncer mengalami kendala, yang diakibatkan oleh belum terintegrasinya aktor dalam pengembangan desa wisata Muncar Moncer, dan keterlibatan BUMDes belum terlihat dalam pengembangan desa wisata, sehingga menyebabkan Pokdarwis kurang dalam mendapatkan dukungan.

Permasalahan lain juga terjadi, khususnya pada tahap *interestment* di mana pada tahap ini aktor utama berusaha untuk memunculkan tindakan untuk meyakinkan dan diikuti aktor lain. Hasil penelitian lain Yoga Aldi Syahputra (2023) memperlihatkan bahwa konflik yang sering terjadi dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer disebabkan karena adanya perbedaan visi misi antar aktor. Ketika pemerintah desa berencana untuk membangun sesuatu, hal tersebut tidak dikomunikasikan kepada pengelola desa wisata yang lain. Ketika komunitas mencoba untuk memberikan ide kepada pemerintah desa, seringkali dari pihak pemdes tidak menerima ide tersebut. Hal tersebut memicu adanya ketidakselarasan, di mana aktor utama yaitu Pokdarwis yang tergabung dalam kelembagaan/komunitas desa wisata, telah memberikan aksi melalui pengusulan ide atau gagasan, tetapi hal tersebut tidak diikuti karena tidak selaras dengan keinginan pemerintah desa.

Sosial media sebagai wadah pengembangan desa wisata untuk mempromosikan dan menarik perhatian pengunjung sudah dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Muncar Moncer, namun hal ini belum dikatakan maksimal karena jangkauannya yang belum meluas. Berbagai macam *update* tentang Desa Wisata Muncar Moncer telah diinformasikan melalui postingan Instagram, Facebook, dan TikTok, tetapi *engagement* atau interaksi dengan audiens masih

belum bisa dikatakan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya aktivitas seperti *like*, komentar, dan berbagi konten dari Desa Wisata Muncar Moncer. *Engagement* memiliki peran penting dalam strategi pemasaran dan *branding*, sehingga menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pemasaran digital. Media lain seperti YouTube juga masih perlu pengelolaan lebih lanjut karena tidak ada perbaruan konten. Konten yang diunggah terakhir kali dilakukan dua tahun yang lalu, atau sekitar tahun 2022.



Gambar 1.2 Kanal YouTube Desa Wisata Muncar Moncer

Sumber: YouTube Muncar Moncer Temanggung (2024)

Adanya permasalahan berupa kurang maksimalnya pengelolaan media sosial dalam mempromosikan Desa Wisata Muncar Moncer, menunjukkan bahwa dalam tahap *enrollment* atau pelibatan, para aktor yang terlibat belum maksimal dalam menjalankan tugas dan peranannya.

Sinergitas antara aktor perlu diciptakan agar jaringan yang telah terbentuk dapat memberikan pengaruh pada kegiatan yang sedang diupayakan. Jaringan aktor akan terbentuk saat ada kesepahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dengan cara

meyakinkan satu sama lain bahwa mereka memiliki kepentingan yang serupa atau dengan menggabungkan beberapa kepentingan yang berbeda menjadi misi yang baru. Menurut Yuniningsih (2018) stabilitas jaringan aktor diukur melalui beberapa tahapan yang dilalui, yaitu *punctualization*, *translation*, *problematization*, *interessment*, *enrollment*, *inscription*, *speaker/delegate representative*, *betrayal*, dan terakhir adalah *irreversibility*.

Tahapan-tahapan dalam pembentukan jaringan aktor menjadi elemen kunci untuk memahami bagaimana proses aktor-aktor tersebut terbentuk dan bagaimana cara mereka menjalin hubungan dalam suatu jaringan, sehingga kegiatan pengembangan desa wisata dapat berjalan optimal selaras dengan tujuan yang telah direncanakan. Penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan karena dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, beberapa tahapan seperti *problematization*, *interessment* dan *enrollment* masih mengalami adanya permasalahan atau kendala, yang menyebabkan terbentuknya jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer **belum stabil/optimal**. Oleh karena itu, dengan adanya beberapa tahapan yang kurang maksimal, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang **“Jaringan Aktor (*Actor Network Theory*) dalam Pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung”**

1.2 Identifikasi Masalah

- 1) Pengembangan desa wisata pada Desa Wisata Muncar Moncer belum berjalan secara optimal.
- 2) Terjadi kompleksitas permasalahan karena banyaknya aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer.
- 3) Jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer belum stabil karena adanya permasalahan pada beberapa tahap pembentukan jaringan aktor (*problematization, interessment, dan enrollment*).

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung?
- 2) Bagaimana tahap pembentukan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Mendeskripsikan dan Menganalisis pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung.
- 2) Mendeskripsikan dan Menganalisis tahap pembentukan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini turut andil dalam proses mengembangkan ilmu administrasi publik, dan hasil dari kegiatan penelitian yang sudah dilakukan ini bisa menjadi salah satu referensi atau acuan untuk melakukan penelitian-penelitian kedepannya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kebermanfaatan dari suatu penelitian dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tujuan penelitian tersebut. Melalui analisis latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang sudah diuraikan, diharapkan agar hasil penelitian ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi semua pihak, antara lain:

1) Bagi Peneliti

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pengalaman tambahan dalam kegiatan penelitian, baik secara teori maupun praktik, sehingga ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan. Penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam proses analisis mengenai permasalahan yang terdapat ada ilmu administrasi publik.

2) Bagi Aktor Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi bagi para aktor dalam mengembangkan desa wisata Muncar Moncer dan menjadi pedoman aktor-aktor terkait untuk memaksimalkan tugas dan peranannya dalam mengembangkan desa wisata Muncar Moncer, Kecamatan Gemawang,

Kabupaten Temanggung agar potensi yang dimiliki dapat dikelola secara optimal dan mampu memberikan keuntungan bagi pihak-pihak terkait.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu didefinisikan sebagai cara peneliti untuk membandingkan penelitian dengan penelitian terdahulu dan mengkaji perbedaannya. Di bagian ini, peneliti menyertakan berbagai macam temuan penelitian-penelitian waktu lalu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan membuat ringkasannya

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	“Analisis Jaringan Aktor: Upaya Pemerintah Mendorong Masyarakat Belanja Produk UMKM Lokal (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Cirebon Satu)” Rachmad Utomo, Kuwat Slamet, Sulfan, Mohammed Lintang T., Angga Sukma D. (2023) Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) 9 (1), 31-38. ISSN 2302-2698	<i>Actor Network Theory</i> Callon (1986) dengan menganalisis tahap translasi: 1. <i>Problematization</i> 2. <i>Interessment</i> 3. <i>Enrollment</i> 4. <i>Mobilization</i>	Pendekatan kualitatif naratif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi	Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahapan <i>problematization</i>, diperlukan kemampuan merumuskan isu pokok yang implementasi dan hasilnya dinikmati bersama para aktor pendukung, <i>interessment</i>, optimalisasi strategi memikat dan mendorong minat aktor pendukung, <i>enrollment</i> pendelegasian peran tanpa mengganggu kewenangan dan <i>mobilization</i>, aktor utama bersama koalisi mengajak tokoh elit dalam bingkai yang lebih solid dan berdampak luas bagi gerakan bersama.	Perbedaan penelitian Rachmad Utomo, dkk. dengan penelitian ini yaitu penelitian Rachmad dkk. membahas mengenai proses translasi jaringan aktor yang terdiri dari <i>problematization</i>, <i>interessment</i>, <i>enrollment</i>, dan <i>mobilization</i> dalam mewujudkan hari belanja <i>online</i> produk UMKM. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai tahapan jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata, yang terdiri dari <i>punctualization</i>, <i>translation</i>, <i>problematization</i>, <i>interessment</i>, <i>enrollment</i>, <i>inscription</i>, <i>speaker/delegative representative</i>, <i>betrayal</i>, dan <i>irreversibility</i>

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2	“Pariwisata Dalam Perspektif <i>Actor Network Theory</i> (Studi Kasus Top Selfie Pinusan Kragilan Desa Pogalan, Jawa Tengah, Indonesia)” Bagus Trianggono, Pamerdi Giri Wiloso, Gatot Sasongko (2018) Jurnal Pariwisata Pesona 3 (2), 91-104. ISSN: 2541-5859	Lima konsep dasar dalam ANT menurut Latour: 1. Aktor 2. Jaringan 3. Aktan 4. Translasi 5. <i>Intermediary</i>	Penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, wawancara mendalam dan FGD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi banyak sekali dinamika didalam proses perintisan hingga pengembangan. Dinamika tersebut terjadi pada elemen yang terlibat di dalam jaringan maupun dinamika sang pengendali di dalam jaringan. Proses translasi dan intermediary mengalami dinamika. Proses perintisan berjalan sempurna, namun pada masa pengembangan, tidak berjalan sempurna karena adanya konflik.	Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Trianggono, dkk. membahas tentang peran aktor dalam pengembangan pariwisata menggunakan konsep dasar ANT yang terdiri dari aktor, jaringan, aktan, translasi, dan <i>intermediary</i>. Sedangkan penelitian ini membahas tentang jaringan aktor beserta proses/tahapan pembentukan jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata.
3	“TAHAPAN PERILAKU AKTOR JARINGAN KOMUNIKASI PADA SOSIALISASI ISU BULLYING”	Tahap perilaku aktor jaringan yang dikemukakan oleh Latour (2005): 1. <i>Problematization</i> 2. <i>Interesment</i> 3. <i>Enrollment</i>	Pendekatan kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semua tahap pembentukan jaringan mulai dari <i>problemization</i>, <i>interessement</i>, <i>enrollment</i>, <i>mobilization</i>, dan	Penelitian yang dilakukan oleh Ruvira Arindita dan Yoedo Shambodo membahas mengenai terbentuknya tahapan perilaku aktor jaringan dalam sosialisasi isu <i>bullying</i>, melalui 5 tahap

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Ruvira Arindita, Yoedo Shambodo (2019) Jurnal Komunikasi Global 8 (2), 213-239. ISSN: 2614218X	4. <i>Mobilization</i> 5. <i>Inscription</i>	<i>purposive sampling</i>	<i>inscription</i> dilakukan oleh relawan inti. Terdapat beberapa aktor vokal yang menjadi simpul jaringan komunikasi yang terkuat dan berkontribusi besar untuk kelangsungan komunitas. Selain itu, kolektivitas manusia seperti lembaga dan organisasi pendukung merupakan faktor kuat yang mendukung jaringan. Aktor non manusia seperti event dan media, sangat membantu dalam menarik minat individu di luar komunitas untuk bergabung menjadi relawan.	yaitu <i>problematization, interessment, enrollment, mobilization, dan inscription</i> . Sedangkan penelitian ini membahas tahapan terbentuknya jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata melalui 9 tahapan yang terdiri dari <i>punctualization, translation, problematization, interessment, enrollment, inscription, speaker/delegative representative, betrayal, dan irreversibility</i> .
4	“ANALISIS JEJARING AKTOR DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM KELURAHAN	Teori ANT dengan menggunakan konsep translasi yang meliputi: 1. <i>Moment of Problematization</i>	Penelitian kualitatif deskriptif, sumber data didapatkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan jejaring aktor di dalam Proklam Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit	Penelitian oleh Rezki Feni Oktaviana, Edison, dan Ramadhani Setiawan bertujuan untuk menjelaskan peranan aktor yang terlibat

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	BUKIT CERMIN KOTA TANJUNGPINANG” Rezki Feni Oktaviana, Edison, Ramadhani Setiawan (2021) JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara 19 (3), 251-261. e-ISSN: 2714-55881	2. <i>Moment of Interestment</i> 3. <i>Moment of Enrollment</i> 4. <i>Moment of Mobilization</i>	melalui studi lapangan, observasi, pengamatan, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi	Cermin tercapai setelah terbentuknya jaringan aktor yang stabil melalui 4 tahapan translasi: <i>Moment of Problematization</i> (Problematisasi), <i>Moment of Interessement</i> (Penarikan), <i>Moment of Enrollment</i> (Pelibatan), <i>Moment of Mobilization</i> (Mobiliaasi) yang dilakukan oleh para aktor.	dalam implementasi program, dan membahas mengenai keberhasilan jejaring aktor yang terbentuk setelah melalui tahap translasi atau proses saat aktor-aktor mulai membentuk suatu aliansi sehingga tercipta jaringan aktor yang stabil. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jaringan aktor beserta tahapan pembentukannya dalam pengembangan pariwisata, spesifiknya pada desa wisata.
5	“TAHAPAN JARINGAN AKTOR DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG”	Teori ANT menurut Yuniningsih (2018) yang melihat hubungan para aktor terjalin melalui tahap: - <i>Punctualization</i> - <i>Translation</i>, - <i>Problematization</i>,	Penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pembentukan jaringan aktor. Terdapat aktor yang memiliki perbedaan pandangan dan tidak dapat disatukan. Kurangnya partisipasi	Penelitian yang dilakukan oleh Anzilna R. Nabella, Tri Yuniningsih, dan Titik Djumiarti membahas tentang tahapan jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya. Sedangkan

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Anzilna R. Nabella, Tri Yuniningsih, Titik Djumiarti (2024) Journal of Public Policy and Management Review 13 (2), 1-17	- <i>Interessment</i>, - <i>Enrollment</i>, - <i>Inscription</i>, - <i>Speaker/Delegative Representative</i>, - <i>Betrayal</i>, - <i>Irreversibility</i>		masyarakat secara umum dalam pengembangan Desa Wisata Wonolopo sehingga dampak adanya desa wisata belum dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tindakan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang diberikan Disbudpar Kota Semarang belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pokdarwis Manggar Selaras.	penelitian ini hanya membahas mengenai jaringan aktor dan tahapan jaringan aktor tanpa menyertakan faktor yang mendorong dan faktor penghambatnya.
6	“Analysis of Actor Networks in the Development of Kandri Tourism Village, Gunungpati District, Semarang City” Tri Yuniningsih, Herbasuki NC, Damaris Bernike Bellastuti (2021)	Teori ANT menurut Yuniningsih (2018) yang melihat hubungan para aktor terjalin melalui tahap: - <i>Punctualization</i> - <i>Translation</i> - <i>Problematization</i> - <i>Interessment</i> - <i>Enrollment</i>	Metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kandri melibatkan banyak aktor kebijakan yang terbentuk melalui 9 (sembilan) tahap, yaitu <i>Punctualization</i> , <i>Translation</i> , <i>Problematization</i> , <i>Interessment</i> , <i>Enrollment</i> , <i>Inscription</i> ,	Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuniningsih, Herbasuki NC, Damaris Bernike Bellastuti bertujuan untuk menganalisis tahapan jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Sedangkan penelitian ini hanya

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Proceedings of the 1st Tidar International Conference on Advancing Local Wisdom Towards Global Megatrends, TIC 2020, 21-22 October 2020, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.	- <i>Inscription</i> - <i>Speaker/Delegative Representative</i> - <i>Betrayal</i>, - <i>Irreversibility</i>		<i>Speaker/Delegative, Representative, Betrayal, Irreversibility</i>	membahas mengenai tahapan pembentukan jaringan aktor tanpa menyertakan faktor yang mendorong dan faktor penghambatnya.
7	“ACTOR NETWORK IN TOURISM MANAGEMENT BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (CASE STUDY OF TOURISM DEVELOPMENT IN BATU CITY, INDONESIA)” Asih Widi Lestari, Sri Suwitri, Endang Larasati, Hardi Warsono (2020)	Teori diemensi jaringan kebijakan Frans Van Waarden (1992) 1. <i>Actors</i> 2. <i>Function</i> 3. <i>Structure</i> 4. <i>Institutionalization</i> 5. <i>Rule of Conduct</i> 6. <i>Power Relations</i> 7. <i>Actor Strategies</i>	Pendekatan kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan jaringan aktor dalam pengelolaan pariwisata berbasis pembangunan berkelanjutan di Kota Batu terdiri dari aktor, fungsi, struktur, institusional, aturan perilaku, hubungan kekuasaan dan strategi aktor. Dianjurkan untuk memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu perlu membentuk wadah	Penelitian yang dilakukan oleh Asih Widi Lestari, Sri Suwitri, Endang Larasati, Hardi Warsono menganalisis jaringan aktor dalam pengelolaan pariwisata berbasis pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari <i>actors, function, structure, institutionalization, rule of conduct, power relations</i> , dan <i>actor strategies</i> . Sedangkan penelitian ini menganalisis tahapan jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP: TRENDS OF DEVELOPMENT ISSUE 3 (13)			“Masyarakat Sadar Lingkungan” sebagai agen pengendali. Pemkot Batu juga perlu memperluas kerja sama dengan akademisi, khususnya dalam kerjasama pengkajian lingkungan.	melalui 9 tahap, yaitu <i>punctualization, translation, problematization, interessment, enrollment, inscription, speaker/delegative representative, betrayal</i> , dan <i>irreversibility</i> .
8	“The conception of actor network in Jelegong art and culture village of Bandung Regency” Eko Bagus Prasetyo, Agus Suharjono Ekomadyo (2021) Arteks: Jurnal Teknik Arsitektur 6 (1), 5-12 eISSN 2541-1217	Teori ANT Collon (1990) dan Latour (2005) preposisi konsep jaringan aktor yang meliputi: 1. <i>The will of actan</i> 2. <i>Actors</i> 3. <i>Composition and translation of action</i> 4. <i>Network locality</i> 5. <i>Network representation</i>	Pendekatan kualitatif, data diambil melalui observasi dan wawancara	Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang diperlukan dalam membentuk jaringan aktor di Desa Jelegong mencakup 1) keinginan seniman untuk memulai aksi seni, 2) keberadaan agen sosioteknik seperti aktor dan sumber daya yang berkaitan dengan seniman, 3) hubungan seni yang kompleks, 4) pendirian lingkungan seni seperti studio dan galeri, dan 5) makna ruang seni bagi seniman sebagai	Penelitian yang dilakukan oleh Eko Bagus Prasetyo dan Agus Suharjono Ekomadyo menganalisis jaringan aktor menggunakan teori jaringan aktor dengan preposisi konsep <i>The will of actan, Actors, Composition and translation of action, Network locality, Network representation</i> . Sedangkan peneliti menggunakan teori ANT yang berfokus pada tahap pembentukan jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata.

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
				wadah pelestarian seni dan budaya serta potensi sumber daya ekonomi.	
9	“Actor-Network Theory in Policy Change of Environmental Permit Policy for the Construction of a Cement Factory in Pati, Indonesia” Ibnu Fath Zarkasi, Ramaditya Rahardian (2022) Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12 (1) ISSN: 2502-9320	Teori ANT Callon (1990) yang mengklasifikasikan proses terjemahan/translasi sebagai: 1. <i>Problematization</i> 2. <i>Interesment</i> 3. <i>Enrollment</i> 4. <i>Mobilization</i>	Metode kualitatif, data diambil menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara, dan FGD	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan berbagai dinamika yang ada keseluruhan penggunaan akses jaringan yang ada, aktor koalisi telah berhasil mengusulkan perubahan kebijakan yang diinginkan dalam bentuk peraturan yang lebih ketat. Koalisi pemenang ini lebih sering terlibat dalam berbagai strategi dan mendapat dukungan publik yang lebih besar. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan pada kegunaan pendekatan Teori Aktor-Jaringan dalam perubahan kebijakan.	Penelitian yang ditulis oleh Ibnu Fath Zarkasi, dan Ramaditya Rahardian menganalisis teori jaringan aktor dalam perubahan kebijakan izin lingkungan untuk pembangunan pabrik semen, melalui 4 tahapan terjemahan, yaitu problematisasi, penarikan, pelibatan, dan mobilisasi. Sedangkan penelitian ini menganalisis jaringan aktor yang berfokus pada tahap pembentukan jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata.

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
10	“TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA: STUDI KASUS DI DESA MUNCAR MONCER, KECAMATAN GEMAWANG, KABUPATEN TEMANGGUNG Yoga Aldi Saputra (2023) Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Menilai efektivitas menggunakan teori CTCG (<i>Community Tourism Collaborative Governance</i>) menurut Keyim (2016), yang terdiri dari: 1. Kolaborasi yang luas dan adil 2. Penyelenggara yang sah dan terampil 3. Sumber daya yang memadai Teori Ospina & Saz-Caranza (2010): 1. Paradoks <i>unity & diversity</i> 2. Paradoks <i>dialogue & conforntation</i>	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor di Desa Wisata Muncar Moncer terjalin melalui sinergi antara swasta (PT Astra <i>Interantional</i> Tbk), komunitas melalui peran Pokdarwis Muncar Moncer, dan pemerintah melalui Dinbudapar Kabupaten Temanggung. Kolaborasi yang luas terjadi diawali dengan adanya konflik. Kolaborasi kemudian terus memberikan progress positif ketika aktor mulai membangun visi, komunikasi, dan koordinasi.	Penelitian yang ditulis oleh Yoga Aldi Saputra menjelaskan tentang efektivitas tata kelola kolaboratif dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Sedangkan penelitian ini ditulis dengan membahas tentang jaringan aktor beserta proses/tahapan pembentukan jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata.

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik sebagaimana dijelaskan oleh Chandler dan Plano dalam Keban (2019) adalah proses yang melibatkan pengaturan dan pengarahan sumber daya manusia untuk melakukan implementasi dan mengatur kebijakan-kebijakan publik. Administrasi publik juga dapat dikatakan sebagai kombinasi antara ilmu dan seni untuk mengatur relasi antara organisasi dengan para *stakeholder*-nya dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah didelegasikan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi memiliki tujuan untuk menyelesaikan isu dan problematika sektor publik dengan melakukan perbaikan dan peningkatan di lingkup organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran. Administrasi publik diartikan sebagai arahan, pemerintahan, proses implementasi, pembentukan asas-asas implementasi kebijakan, proses menganalisis dan mempresentasikan keputusan serta pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individu atau kelompok dalam menciptakan barang dan jasa publik (Dunsire dalam Keban, 2019).

Ruang lingkup dari administrasi publik sangat kompleks karena bergantung pada perkembangan kebutuhan serta isu yang ada dalam masyarakat. Semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, maka hal ini dapat berdampak pada meningkatnya kompleksitas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2010) membatasi administrasi publik sebagai gabungan antara konsep teoritis dan penerapan praktis untuk memperkenalkan pemahaman mengenai peran pemerintah dengan masyarakat yang diberi perintah, serta untuk

mendorong agar kebijakan publik lebih memberikan respon yang cepat terhadap keperluan dan kepentingan masyarakat. Dari beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kolaborasi atau perpaduan antara konsep teoritis dan penerapan praktis yang melibatkan serangkaian tindakan manajerial untuk mencapai nilai yang bersifat normatif dalam masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Setiap paradigma pasti mengalami pergerakan dari paradigma lama ke paradigma baru. Hal ini terjadi karena paradigma baru menilai bahwa paradigma lama masih memiliki kekurangan dan sudah tidak sesuai untuk diterapkan di masa sekarang. Paradigma baru hadir untuk memperbaiki kekurangan/kelemahan yang ada pada paradigma sebelumnya. Paradigma-paradigma yang muncul ini adalah perspektif para ahli untuk memahami peran dan tantangan administrasi publik dalam memecahkan problematika yang muncul. Nicholas Henry, mengidentifikasi enam paradigma administrasi publik, yang meliputi dikotomi administrasi publik, prinsip-prinsip administrasi, administrasi publik sebagai ilmu politik, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, administrasi publik sebagai administrasi publik, dan administrasi publik baru atau *governance*.

Paradigma pertama (1900-1926) dikenal sebagai dikotomi administrasi publik. Tokoh paradigma ini antara lain seperti Frank J. Goodnow dan Leonard D. White Goodnow dalam karyanya yang berjudul "*Politics and Administration*" yang berfokus pada pemisahan antara perkara politik dari perkara administrasi dalam fungsi pokok pemerintahan. Dalam pandangannya, ilmu politik hanya

terdiri dari problematika politik, pemerintahan, dan kebijaksanaan. Sedangkan subsatansi administrasi publik terdiri dari problematika organisasi, ketenagakerjaan, dan proses penrumusan anggaran dalam pemerintahan. Lokus politik dari paradigma ini terpusat pada lembaga legislatif dan yudikatif yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, sedangkan lokus administrasi dari paradigma ini yaitu pada badan eksekutif yang tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Sayangnya paradigma ini hanya menekankan pada lokusnya saja, sedangkan fokusnya belum dijelaskan secara terperinci.

Paradigma kedua (1927-1937) atau prinsip-prinsip administrasi. Tokoh yang berperan dalam paradigma ini antara lain Willoughby, Gullick dan Urwick, Henry Fayol, dan F.W Taylor. Pada era ini, administrasi didominasi oleh keterlibatan bidang-bidang lain seperti industri, manajemen, dan lainnya yang berdampak pada terbentuknya prinsip-prinsip POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi fokus dari kajian administrasi, sementara itu lokus dari paradigma ini belum ditekankan secara jelas. Dalam kenyataannya, prinsip-prinsip tersebut dapat diberlakukan hampir di segala konteks, lingkungan, tujuan atau struktur organisasi, termasuk budaya. Dapat disimpulkan bahwa administrasi dapat berlaku di mana saja apabila prinsip-prinsip ini ditaati dan diikuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Paradigma ketiga (1950-1970) yang dikenal dengan administrasi publik sebagai ilmu politik. Pada fase ini, tokoh yang bernama Herbert Simon

menegaskan kritiknya pada ketidakkonsistensian prinsip administrasi, dan berpendapat bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku secara universal. Paradigma ini menganggap bahwa administrasi negara akan selalu dipengaruhi oleh nilai tertentu dan tidak *value free* (dapat berlaku di mana saja). Paradigma ini memiliki lokus yaitu birokrasi pemerintahan, namun fokusnya kurang jelas karena masih lemahnya prinsip-prinsip dalam administrasi publik.

Paradigma keempat (1956-1970) yang disebut dengan administrasi publik sebagai ilmu administrasi (manajemen). Pada era ini, pengembangan pemahaman psikologi sosial sebagai pelengkap digunakan dalam ilmu administrasi. Perilaku organisasi, analisa manajemen, analisa sistem, riset operasi dan lain-lain berperan sebagai fokus dalam paradigma ini. Paradigma berkembang menjadi lebih berpandangan pada perkembangan ilmu administrasi orisinal yang mendapat dukungan dari pendidikan psikologi sosial dan yang berfokus pada kebijakan publik. Semua fokus di dalamnya diasumsikan mampu diimplementasikan baik dalam bidang bisnis maupun administrasi publik, sehingga lokus dari paradigma keempat ini menjadi tidak jelas (Keban, 2019).

Paradigma kelima (1970) yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Pada tahap ini, ada upaya untuk membangun kembali disiplin sebagai bidang studi yang otonom. Pada tahap ini, birokrasi bergeser ke pasar dan organisasi sektor swasta. Dengan kata lain, ada perubahan dari model administrasi publik tradisional, konvensional ke model NPM. Fokus dan lokus dari paradigma ini terlihat jelas. Fokusnya yaitu pada teori organisasi, manajemen, dan kebijakan

publik, sementara masalah-masalah dan kepentingan masyarakat dijadikan sebagai lokusnya.

Paradigma keenam (1990-sekarang) yang dikenal dengan administrasi publik baru atau *governance*. Paradigma ini dikemukakan oleh George Frederickson di samping 5 paradigma yang telah dikemukakan oleh Nicholas Henry. Peters dalam Ikeanyibe (2017) menyebutkan bahwa paradigma *governance* memiliki hubungan yang dekat dengan NPM, kesamaan dari kedua paradigma ini yaitu keduanya sama-sama berusaha untuk menyelesaikan hierarki dan *top-down* dalam sistem pemerintahan yang ada di masa lalu. Peters juga memberikan disimilaritas yang jelas antara NPM dan *governance*, dimana pada NPM penggunaan aktor non pemerintah dilakukan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi dan membatasi kekuatan negara, sedangkan pada pendekatan *governance* sebagian unsur efisiensi memiliki pembenaran utama untuk melibatkan partisipasi masyarakat sipil, peningkatan partisipasi dan pengakuan terhadap kapasitas jaringan yang ada pada masyarakat sipil.

Penelitian ini lebih menekankan pada paradigma keenam, yaitu *governance*. Hal ini karena dalam pengembangan desa wisata Muncar Moncer, terdapat beberapa aktor yang terlibat untuk pengelolaan sumber daya atau potensi yang dimiliki desa Muncar. Pertama adalah pemerintah, yang terdiri dari Pemerintah Desa Muncar, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Kedua, sektor swasta melalui PT Astra International Tbk. dan terakhir terdapat komunitas masyarakat yaitu Kelompok Sadar Wisata Muncar Moncer.

1.6.4 Kebijakan Publik

Graycar dalam Keban (2019) memandang sebuah kebijakan dari berbagai macam sudut pandang, yaitu filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Sebagai konsep filosofis, kebijakan diartikan sebagai rangkaian asas, prinsip atau kondisi yang diharapkan. Sebagai suatu produk, kebijakan didefinisikan sebagai kumpulan kesimpulan atau rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tertentu; dari segi proses, kebijakan dipandang sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dari suatu program dalam mencapai suatu tujuan. Lalu yang terakhir, sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan tindakan tawar menawar atau negosiasi untuk menyusun permasalahan-permasalahan yang ada, dan bagaimana metode implementasi atau pelaksanaannya. Kebijakan dalam pandangan Turner dan Hulme (1997) merupakan sebuah proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut (*policy making and policy implementation*). Hal ini kemudian diperjelas bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang sifatnya hirarkis, yaitu dimuali dari tingkat atas (*top level*) hingga tingkat bawah (Shafritz & Russel, 1997).

Kebijakan publik adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik atau pemerintah (Chandler & Plano, 1998). Kebijakan publik dianggap sebagai intervensi pemerintah terhadap masyarakat yang tidak berdaya, agar mereka tetap dapat hidup dan ikut berkontribusi mendukung kegiatan pemerintahan. Sedangkan Shafritz dan Russell (1997) mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever*

government decides to do or not to do”. Setiap hal yang dilakukan pemerintah adalah sebuah kebijakan, begitu pula dengan pilihan diamnya pemerintah dalam menghadapi suatu isu atau permasalahan. Secara umum, kebijakan publik dipandang sebagai aksi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi isu publik, dengan berfokus pada untuk siapa, kapan dan bagaimana aksi tersebut dilakukan (Peterson, 2003). Pada intinya, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, untuk menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalam kebijakan tersebut.

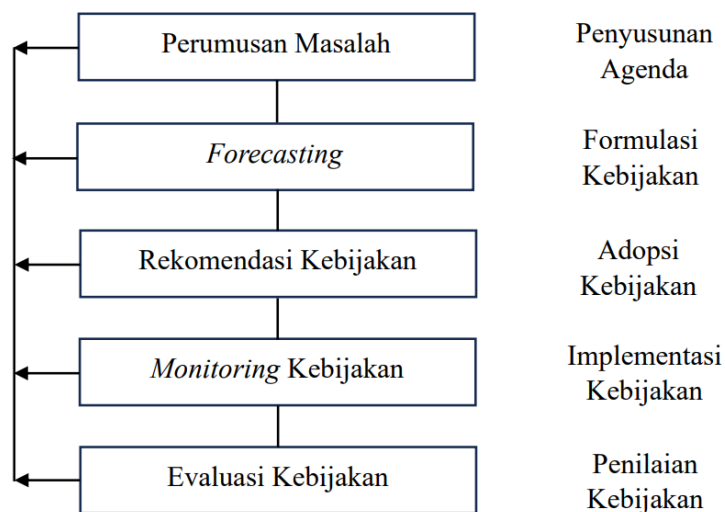
1.6.5 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik berkaitan dengan proses membuat pilihan-pilihan kebijakan beserta tahapan-tahapannya, dan didasari oleh faktor-faktor dan pertimbangan seperti *who gets what, when, how* (siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana). Setidaknya, ada lima tahap yang terdapat dalam proses kebijakan publik menurut Dunn (2004). Tahapan tersebut yaitu.

- 1) Penetapan Agenda Kebijakan (*Agenda Setting*). Pada tahap ini, ditentukan apa saja yang menjadi permasalahan publik dan perlu untuk segera diselesaikan. Masalah-masalah tersebut ditelaah dengan prosedur tertentu yang sering disebut dengan *problem structuring*. Dengan prosedur tersebut maka akan didapatkan hasil mengenai apa penyebab yang membuat masalah tersebut termasuk ke dalam masalah kebijakan dan bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah.

- 2) Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*). Tahap ini merupakan tahap ketika para analis melakukan identifikasi terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang kemungkinan dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan adanya prosedur *forecasting* atau peramalan untuk mengetahui bagaimana kondisi di masa depan, sehingga setiap konsekuensi yang timbul dari alternatif yang diterapkan itu dapat diperkirakan.
- 3) Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*). Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi, ketika keputusan mengenai penerimaan suatu kebijakan diambil oleh pihak-pihak yang berwenang. Pihak-pihak tersebut seperti administrator publik dan lembaga legislatif. Rekomendasi dapat membantu menentukan tingkat rasionalitas dan ketidakpastian, menentukan kriteria dalam membuat keputusan, dan menentukan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.
- 4) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*). Merupakan tahap ketika kebijakan yang telah melalui tahap adopsi tersebut mulai dilaksanakan oleh pemerintah dengan dana dan sumber daya yang tersedia, dan diharapkan agar kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang baik, yaitu mampu menyelesaikan permasalahan. Implementasi dari suatu kebijakan mengikutsertakan usaha para *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku para birokrat, agar mereka mau melayani dan mengatur perilaku kelompok yang dijadikan sasaran.

5) Penilaian Kebijakan. Dalam tahap ini, proses evaluasi diterapkan untuk memonitor dan menilai hasil dan kinerja dari kebijakan yang sedang berlangsung maupun kebijakan yang sudah berlangsung. Tahap ini dilakukan untuk melihat serta memberikan penilaian apakah kebijakan yang dipilih dan diberlakukan telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan ditentukan sebelumnya. Tahap ini dapat membantu para pengambil keputusan untuk memutuskan kebijakan tersebut harus dilanjutkan, diberhentikan, atau direstrukturisasi.



Gambar 1.3 Proses Kebijakan Publik

Sumber: William Dunn (2004)

1.6.6 Jaringan Aktor/*Actor Network Theory* (ANT)

Teori jaringan aktor atau *Actor Network Theory* (ANT) merupakan pendekatan studi ilmu pengetahuan yang menganggap benda sebagai bagian dari jaringan sosial (Yuniningsih, 2018). Konsep jaringan aktor ini pertama kali dicetuskan oleh Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law pada tahun 1980-an. Jaringan aktor menggambarkan bahwa realitas seperti sosial, organisasi, dan teknologi merupakan hubungan dari berbagai jenis entitas baik benda maupun manusia. Semua entitas yang berperan dalam jejaring ini disebut sebagai “aktor”. Latour dalam Trianggono (2018) mendefinisikan aktor sebagai kesatuan elemen yang saling terhubung dalam jaringan. Aktor mencakup keseluruhan jaringan yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dalam hal ini aktor tidak dinyatakan sebagai seorang individu atau elemen non-manusia.

Dasar dari *actor network theory* atau teori jaringan aktor yaitu memahami bagaimana hubungan antara manusia dengan benda-benda (non-manusia) dapat membentuk jaringan heterogen yang stabil, dengan tujuan untuk memastikan setiap elemen yang terlibat dalam jaringan saling bekerja sama sesuai kepentingannya masing-masing untuk menyelesaikan suatu masalah (Law, 1992; Callon, 1999). Dalam hal ini, yang termasuk aktor non-manusia yaitu benda berwujud seperti teknologi, perangkat komunikasi, kendaraan, sedangkan benda tak berwujud meliputi ideologi, keyakinan/agama, pengetahuan, perangkat lunak, dan jaringan maya (Utomo et al., 2023).

Terdapat 5 (lima) konsep dasar dalam ANT, yaitu aktor, jaringan, aktan, translasi, dan intermediary menurut Latour dalam Trianggono (2018). Kelima konsep itu merupakan kesatuan utuh yang tak terpisahkan.

- 1) Aktor. Aktor tidak dipandang sebagai individu atau benda, tetapi kesatuan jaringan yang menjalin interaksi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan. Aktor merupakan pola di dalam jaringan, yang memberi pengaruh pada jaringan yang terbentuk.
- 2) Jaringan. Jaringan (*network*) adalah yang terangkai atau terhubung. Jaringan terdiri dari berbagai elemen baik manusia ataupun benda yang saling berkoordinasi dan saling berhubungan.
- 3) Aktan (Aktor Pengendali). Aktan merupakan aktor pengendali dalam jaringan, yang memiliki kemampuan untuk keluar masuk suatu jaringan sesuai keinginan dan urusannya.
- 4) Translasi. Translasi merupakan proses menerjemahkan setiap interaksi dan koordinasi yang ada pada jaringan. Teknik ini akan mengartikan kode atau tanda dari berbagai bahasa dan budaya untuk mengidentifikasi aktor dalam jaringan.
- 5) *Intermediary*. Merupakan perantara atau pihak perunding yang bertindak sebagai penghubung antara aktor atau skumpulan aktor, individu, atau entitas yang akan mempengaruhi, antar berbagai agen, dan perantara.

Jaringan aktor dilihat sebagai studi multidisiplin yang komprehensif, karena mencakup objek studi dari tingkat mikro hingga makro. Yuniningsih (2018) berpendapat bahwa sebuah jaringan merupakan kumpulan kompleks yang

memetakan hubungan yang melibatkan atribut dan aliran antar individu. Aktor-aktor yang ada dalam suatu jaringan meliputi berbagai macam pihak, seperti akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah, serta media massa. Keberhasilan jaringan aktor yang terbentuk bergantung pada konsistensi aktor-aktor yang terlibat dan saling berinteraksi di dalamnya (Whittle & Spicer, 2008 dalam Ryan, 2020).

Interaksi dalam sebuah jaringan dapat diciptakan melalui konflik yang timbul karena adanya perbedaan tujuan dengan aktor utama, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan dari aktor-aktor lain dan munculnya jaringan baru. Konflik diciptakan agar aktor utama dapat melihat konflik tersebut dan mulai mengalokasikan peran, nilai dan sumber daya untuk mengatasinya. Pada intinya, di dalam jaringan aktor terdapat kelompok yang memiliki pandangan serupa dalam melihat suatu permasalahan, dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan atau kepentingan bersama, sehingga terbentuklah sebuah jaringan yang baru.

1.6.7 Tahapan Jaringan Aktor

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan tahapan sebagai bagian dari suatu perkembangan, bagian dari sesuatu yang memiliki awal dan akhir, serta bagian dari urutan tingkat. Terdapat tahapan atau tingkatan bagaimana aktor-aktor di dalam sebuah jaringan saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini, jaringan yang tercipta akan mengalami proses penyesuaian aksi atau yang disebut dengan translasi (Riyanto & Fathon, 2022). Latour dalam Yuniningsih (2018) mengemukakan bahwa teori ANT biasanya tidak menjelaskan mengapa dan bagaimana sebuah jaringan dapat

terbentuk. Sebaliknya, teori ini digunakan untuk mengeksplorasi hubungan dalam jaringan yang bervariasi.

Menurut Callon (1990) relasi antar aktor dalam jaringan dapat terlihat dari empat tahapan, yaitu:

- 1) Problematisasi (*Problematization*). Merupakan tahap di mana aktor utama atau inisiator mulai memunculkan isu/permasalahan untuk menarik perhatian aktor lain. Pada tahap ini pula, aktor-aktor mulai mengidentifikasi sifat dan masalah yang dapat diselesaikan salah satunya dengan cara berpartisipasi dalam jaringan.
- 2) Penarikan (*Interessment*). Saat proses problematisasi sukses dijalankan, aktor yang terstimulasi akan menanggapi dengan cara setuju atau tidak setuju. Hal ini akan terlihat dari masuknya aktor-aktor lain sebagai bentuk komitmen mereka untuk berkoalisi demi kepentingan bersama. Sebaliknya, hal ini dapat memicu adanya sikap acuh dari aktor-aktor yang menyebabkan koalisi tidak tercipta karena kurangnya dukungan konkrit (Utomo et al., 2023).
- 3) Pelibatan (*Enrollment*). Merupakan tahap di mana pembagian peranan aktor mulai terlihat. Dalam pelibatan ini, para aktor mulai mengevaluasi kemampuan masing-masing dengan mengirim perwakilan sebagai perantara. Selama proses ini, berbagai bentuk penolakan atau perlawanan dari berbagai aktor mulai muncul ketika mereka berinteraksi atau bekerja sama.
- 4) Mobilisasi (*Mobilization*). Pada tahapan ini, bentuk jaringan aktor telah teridentifikasi, bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan memiliki

fleksibilitas yang luas. Jaringan aktor terbentuk dengan koalisi yang lebih kuat, dan mampu menjalankan tugas yang diberikan (Farhangi et al., 2020). Aktor-aktor akan bertemu di satu titik pusat, yang mengarah pada pembagian tugas untuk menyelesaikan isu bersama.

Sedangkan menurut Yuniningsih (2018), tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam teori jaringan aktor yaitu:

- 1) *Punctualization* merupakan proses memperlakukan jaringan yang heterogen sebagai aktor individu untuk menghindari adanya kompleksitas jaringan (Callon, 1990). Langkah ini penting dalam sebuah penelitian untuk menyederhanakan proses penarikan kesimpulan. Kompleksitas jaringan terjadi karena satu aktor utama didukung oleh banyak aktor di belakangnya mulai dari aktor materiil maupun non-materiil karena keselarasan dan kesepakatan bersama untuk bergabung. Oleh karena itu, tahap ini merupakan tahap penyederhanaan jaringan yang beragam menjadi satu aktor tunggal.
- 2) *Translation* merupakan bentuk penyelarasan keinginan dari beberapa aktor dengan menerjemahkan tujuan setiap aktor dengan aktor utama. Tahap ini meliputi permasalahan, kepentingan, dan peran, di mana setiap aktor akan menyelaraskan masalah utama dengan mempertimbangkan kepentingan mereka, dan menentukan peranannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini, para aktor melihat di mana letak keuntungan yang akan mereka dapatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

- 3) *Problematization* adalah tahap menetapkan kepentingan aktor lain yang sejalan dengan kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, aktor utama akan menghadirkan isu yang menjadi perhatian bagi aktor lain, kemudian isu tersebut diubah menjadi masalah yang didefinisikan oleh aktor lain hingga mencapai “*obligatory passage point*” (OPP). Aktor-aktor dalam tahap ini akan merumuskan masalahnya dan menetapkan peranannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi perhatian bagi setiap aktor. Permasalahan dirumuskan dengan cara berdiskusi langsung maupun tidak langsung untuk menyelaraskan pandangan dan kesepakatan dalam melihat suatu masalah.
- 4) *Interessment* merupakan tindakan yang dijalankan oleh aktor utama untuk mengajak aktor lain ikut serta dalam menjaga stabilitas jaringan yang terbentuk, melalui identifikasi masalah. Pada tahap ini, aktor utama berusaha untuk memperoleh sokongan dari aktor lain dalam menetapkan masalah, strategi penyelesaiannya, proses penyelesaiannya, dan waktu penyelesaian masalah guna menacapai tujuan bersama.
- 5) *Enrollment* adalah tahap menerima kepentingan. Resistensi atau penolakan yang muncul dapat diatasi melalui kesepakatan yang diberikan oleh masing-masing aktor. Pada tahap ini, aktor lain mulai menyetujui definisi permasalahan dan membentuk suatu jaringan. Mereka mulai saling mendistribusikan peran dan kewenangan satu sama lain, dan menyepakati manfaat yang didapat oleh masing-masing aktor. Hal tersebut dikenal dengan “*who get what*”

- 6) *Inscription* adalah proses penciptaan simbol. Latour (2005) menyebutkan bahwa *inscription* merupakan proses di mana sebuah informasi direpresentasikan dalam bentuk fisik/material yang dapat dipertukarkan. Pada tahap ini, perjanjian antara aktor-aktor dibuat. Perjanjian bisa berupa kesepakatan lisan atau tertulis. Kesepakatan lisan memerlukan komitmen dan kepercayaan yang tinggi dari setiap aktor karena dapat mengancam integritas jaringan akibat pelanggaran kesepakatan.
- 7) *Speaker/Delegative Representative* merupakan pihak yang berbicara atas nama aktor lain dalam sebuah jaringan. Dalam hal ini, aktor utama berperan sebagai perwakilan yang menyampaikan pendapat atau keputusan aktor lain, atau peran yang diberikan aktor utama oleh aktor lain untuk menjadi juru bicara dalam mengomunikasikan keputusan di dalam jaringan. Dalam tahap ini, terdapat penentuan kapan aktor utama akan mewakili aktor lain, dan kapan aktor lain akan menjadi juru bicara sesuai kesepakatan dengan aktor utama.
- 8) *Betrayal* adalah situasi di mana aktor tidak mengikuti kepentingan aktor lain dalam jaringan. Pada tahap ini, aktor melanggar perjanjian awal dan melakukan pengkhianatan. Hal ini menyebabkan kesepakatan menjadi menyeleweng dari tujuan karena adanya pelanggaran perjanjian yang telah disepakati sejak awal pembentukan jaringan.
- 9) *Irreversibility* merupakan tahap penciptaan alternatif kepentingan atau kembali ke kondisi awal. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap *betrayal*, di mana jaringan yang terpecah bisa disatukan kembali melalui

langkah atau alternatif lain. Walsham dan Sahay (1999) menyebutkan bahwa penyelarasan dapat terjadi setelah adanya *irreversibility*, yaitu keadaan di mana jaringan yang sudah terpecah mampu menyatukan kembali kekuatannya. Dengan demikian, jaringan dimulai kembali dari tahap penyelarasan keinginan meskipun tetap memiliki risiko pengkhianatan perjanjian.

Tahapan jaringan aktor memiliki peran penting dalam mengevaluasi keberhasilan jaringan yang terbentuk. Resistensi atau ketidakoptimalan hubungan antar aktor dalam jaringan bisa tercermin dari pelaksanaan tahapannya. Perkembangan sektor pariwisata juga bisa dilihat melalui interaksi antar aktor di dalamnya dan proses tahapan yang dilalui dalam pengembangan sektor tersebut. Secara rinci, tahapan jaringan aktor dapat dilihat melalui tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 1.6 Tahapan Jaringan Aktor

No	Tahapan Jaringan	Penjelasan
1	<i>Punctualization</i>	Mengidentifikasi aktor yang terlibat
2	<i>Translation</i>	Penerjemahan tujuan dan kemampuan/sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor
3	<i>Problematization</i>	Mendefinisikan kepentingan/peran aktor melalui perumusan masalah
4	<i>Interessment</i>	Tindakan yang dimunculkan aktor utama untuk meyakinkan aktor lain
5	<i>Enrollment</i>	Pendelegasian wewenang dan penerimaan kepentingan para aktor
6	<i>Inscription</i>	Penciptaan simbol/artefak sebagai jaminan kesepakatan

No	Tahapan Jaringan	Penjelasan
7	<i>Speaker/Delegative Representative</i>	Juru bicara atas nama aktor-aktor lain atau aktor yang menjadi perwakilan dalam jaringan
8	<i>Betrayal</i>	Situasi ketika aktor melakukan penyimpangan terhadap perjanjian/kesepakatan
9	<i>Irreversibility</i>	Proses penciptaan alternatif untuk menyatukan kembali jaringan

Sumber: diadopsi dari Callon dan Latour dalam Yuniningsih (2018)

1.6.8 Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata merupakan area atau wilayah pedesaan yang memanfaatkan berbagai unsur dengan atribut produk wisata secara terpadu, dan menawarkan suasana khas pedesaan baik dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan adat istiadatnya (Putra, 2006). Kemenparekraf (2021) memetakan tingkatan desa wisata yang terdiri dari empat tingkatan, yaitu:

- 1) Desa wisata rintisan, yaitu desa yang masih sebatas dianggap memiliki potensi, belum menghasilkan produk, belum terdapat kunjungan wisatawan, fasilitas yang sangat terbatas, dan kesadaran masyarakat belum muncul
- 2) Desa wisata berkembang, yaitu desa yang masih berupa potensi, tetapi sudah mulai direncanakan untuk dikembangkan lebih jauh. Desa ini sudah mulai dikunjungi oleh beberapa wisatawan
- 3) Desa wisata maju, memiliki masyarakat yang sudah mulai sadar akan pengembangan wisata dan mampu mengelola usaha wisata menggunakan dana desa. Desa ini sudah dikunjungi banyak wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara

- 4) Desa wisata mandiri, merupakan desa yang dikembangkan dengan inovasi pariwisata dari masyarakat setempat. Desa wisata ini telah diakui dunia, memiliki sarana prasarana yang terstandarisasi, dan dikelola dengan model kerja sama kolaboratif *pentahelix*.

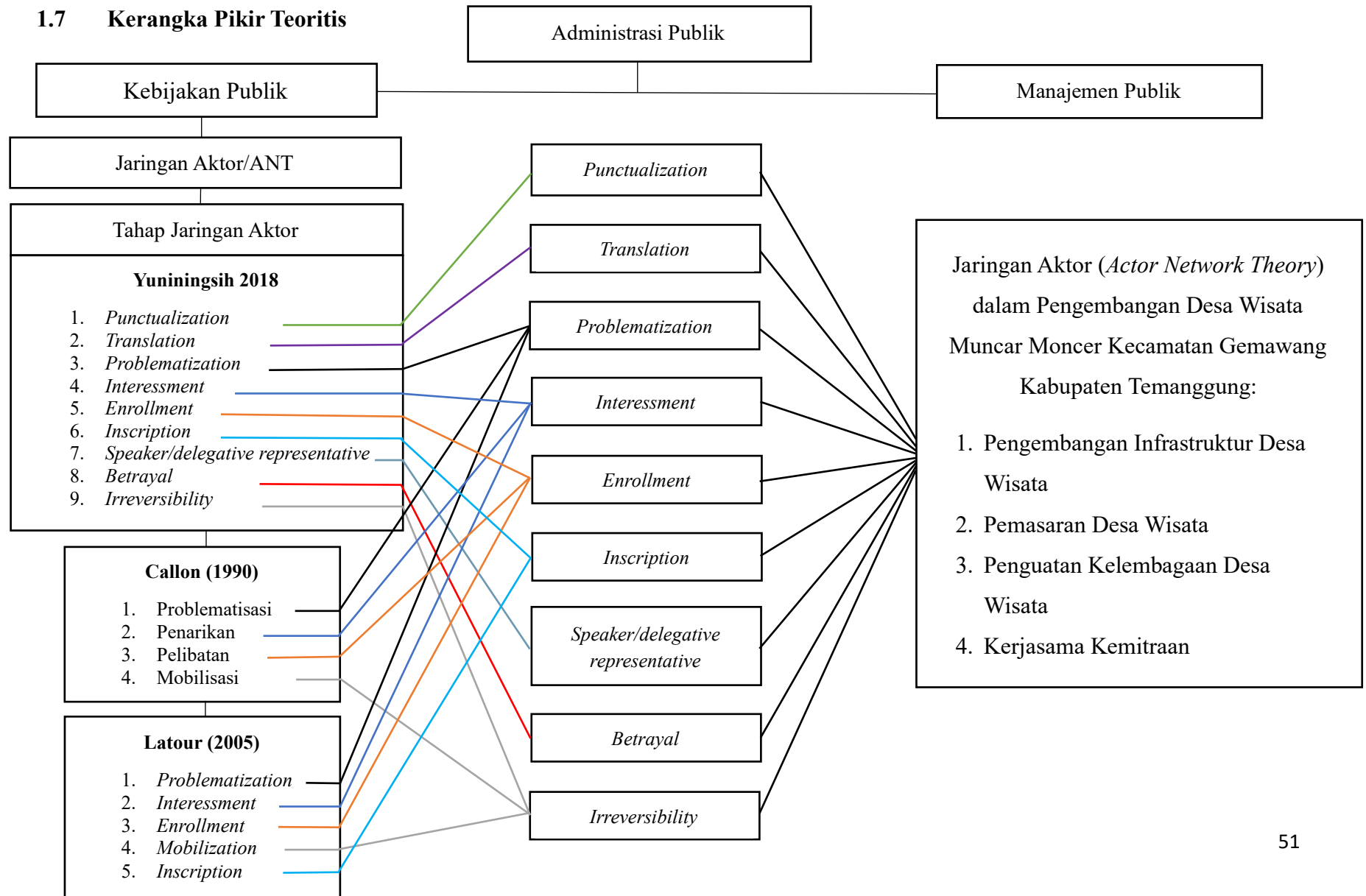
Pearce dalam Arida (2017) mendefinisikan pengembangan desa wisata sebagai proses yang berfokus pada upaya untuk memajukan dan memperbaiki desa wisata. Spesifiknya, pengembangan desa wisata ini meliputi upaya-upaya untuk melengkapi dan meningkatkan sarana prasarana wisata sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Tujuan dari adanya pengembangan kawasan desa wisata menurut Gumelar (2010) adalah:

- Mengetahui lebih dalam mengenai jenis wisata yang sesuai dan mampu memenuhi gaya hidup masyarakat setempat
- Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai bentuk pariwisata yang memanfaatkan lingkungan mereka, serta memastikan bahwa masyarakat menerima pendapatan yang layak dari aktivitas pariwisata tersebut
- Mendukung dan mendorong kewirausahaan masyarakat sekitar
- Mengembangkan dan meningkatkan produk wisata desa.

Keberhasilan dari pengembangan desa wisata bergantung pada kesediaan masyarakat lokal untuk menerima dan mendukung kegiatan tersebut (Wearing &

McDonald, 2002). Masyarakat lokal memainkan peran krusial dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya, tradisi, dan budaya unik yang mereka punya menjadi unsur utama untuk menggerakkan aktivitas wisata tersebut (Gautama et al., 2020). Dalam pengembangan desa wisata, pengelolaan desa wisata ini diharapkan mampu tumbuh dan berkembang baik, melalui kegiatan perencanaan yang berlandaskan masyarakat. Hal ini karena dalam pengembangan pariwisata harus mengacu pada prinsip keberlanjutan, yang berarti bahwa pengembangan ini harus dapat didukung secara ekologis dalam jangka waktu lama, ekonomis secara finansial, dan adil secara etika dan sosial masyarakat.

1.7 Kerangka Pikir Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata merupakan upaya untuk meningkatkan potensi lokal yang dimiliki desa agar menjadi destinasi wisata yang bermanfaat bagi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung No. 95 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata, pasal 15 mengenai Pengembangan Desa Wisata, dengan gejala:

- a) Pengembangan Infrastruktur Desa Wisata
- b) Pemasaran Desa Wisata
- c) Penguatan Kelembagaan Desa Wisata
- d) Kerjasama Kemitraan

1.8.2 Tahapan Jaringan Aktor

Tahap jaringan aktor adalah proses pembentukan jaringan aktor dan bagaimana para aktor tersebut saling berinteraksi/bekerja sama berdasarkan tujuan bersama, dalam pengembangan desa wisata. Tahapan yang dilalui dalam pembentukan sebuah jaringan aktor yaitu:

- a) *Punctualization*, yaitu mengidentifikasi aktor yang terlibat
- b) *Translation*, adalah proses menyelaraskan keinginan aktor sesuai kemampuan untuk mencapai kesetaraan
- c) *Problematization*, merupakan tahap mengartikan keinginan aktor melalui perumusan masalah dan mendefinisikan peran aktor

- d) *Interessment*, yaitu tindakan yang dimunculkan aktor utama untuk meyakinkan aktor lain
- e) *Enrollment*, yaitu aktor-aktor saling menerima kepentingan dan terciptanya pendelegasian wewenang
- f) *Inscription*, merupakan bentuk kesepakatan baik lisan maupun tertulis
- g) *Speaker/delegative representative*, adalah juru bicara yang mewakili suara aktor lain dalam sebuah jaringan
- h) *Betrayal*, yaitu situasi ketika aktor menyimpang atau menyeleweng dari kesepakatan
- i) *Irreversibility*, merupakan proses normalisasi melalui alternatif-alternatif kepentingan lain atau kembali ke keadaan awal.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan penelitian yang dilakukan sesuai dengan rencana dan prosedur, serta dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mengumpulkan data untuk dideskripsikan, dikembangkan, dan untuk menemukan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono, 2012). Dengan menentukan suatu metode untuk penelitian, hasil penelitian yang dilakukan ini dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, metode penelitian juga bermanfaat untuk menjelaskan berbagai macam gejala-gejala sosial dan alam yang terjadi pada kehidupan manusia, berdasarkan prosedur yang teratur dan sistematis.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2012) berpendapat bahwa metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian didasarkan pada filsafat *postpositivisme* untuk mengkaji fenomena, di mana dalam hal ini peneliti memiliki peran sebagai instrumen utama yang menghimpun data dengan cara penggabungan dari berbagai sumber, menganalisis data secara induktif/kualitatif, dan penekanan dari hasil penelitiannya yaitu pada maknanya, bukan geeneralisasi. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian diperankan oleh manusia, dan hasil dari penelitian ini berupa pernyataan yang bersifat menjelaskan dan berdasarkan pada fakta di lapangan (objek penelitian).

Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan dan menganalisis jaringan aktor yang terbentuk dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung.

1.9.2 Situs Penelitian

Penentuan lokus penelitian ini memudahkan peneliti dalam menentukan objek dalam melakukan penelitian kualitatif. Peneliti memilih lokus penelitian di Desa Wisata Muncar Moncer, Desa Muncar, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Penentuan fokus penelitian dapat memperjelas subjek penelitian, terutama dalam melakukan penelitian kualitatif. Peneliti menentukan fokus penelitian pada jaringan aktor dalam pengembangan desa wisata.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau dengan arti lain informan merupakan pihak yang mampu memberikan informasi penting bagi penelitian. Arikunto (2006) memaparkan bahwa subjek penelitian menjadi salah satu hal yang penting kedudukannya dalam penelitian, yang harus disusun sebelum peneliti bersiap untuk menghimpun data. Melalui subjek penelitian ini, peneliti dapat mendapatkan informasi mengenai situasi dan kondisi nyata di lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah informan yang aktif berpartisipasi dan mengetahui secara mendalam mengenai pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

Tabel 1.7 Subjek Penelitian

No	Informan	Teknik	Total
1	Ketua Pokdarwis Muncar Moncer	<i>Purposive Sampling</i>	1
2	Anggota Pokdarwis Muncar Moncer	<i>Random Sampling</i>	2
3			
4	Fasilitator DSA PT Astra	<i>Purposive Sampling</i>	1
5	Analisis Objek Wisata Dinbudpar	<i>Purposive Sampling</i>	1
6	Kepala Desa Muncar	<i>Purposive Sampling</i>	1
Total			6

Informan-informan tersebut dipilih sebagai subjek penelitian karena aktif terlibat dalam jaringan kerja sama untuk pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer.

1.9.4 Fenomena Penelitian

Tabel 1.8 Fenomena Penelitian

No	Konsep	Fenomena	Gejala
1	Pengembangan desa wisata merupakan upaya untuk meningkatkan potensi lokal yang dimiliki desa agar menjadi destinasi wisata yang bermanfaat bagi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung No. 95 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata, pasal 15 mengenai Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan infrastruktur desa wisata
			Pemasaran desa wisata
			Penguatan kelembagaan desa wisata
			Kerjasama kemitraan
2	Tahap jaringan aktor adalah proses pembentukan jaringan aktor dan bagaimana para aktor tersebut saling berinteraksi/bekerja sama melalui tahap: 1. <i>Punctualization</i> Mengidentifikasi aktor yang terlibat	Tahap Pembentukan Jaringan Aktor <i>2.1 Punctualization</i>	Pengembangan infrastruktur desa wisata
			Pemasaran desa wisata
			Penguatan kelembagaan desa wisata
			Kerjasama kemitraan
	2. <i>Translation</i> Penerjemahan tujuan dan kemampuan/sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor	<i>2.2 Translation</i>	Pengembangan infrastruktur desa wisata
			Pemasaran desa wisata
			Penguatan kelembagaan desa wisata
			Kerjasama kemitraan

	3. <i>Problematization</i> Mendefinisikan kepentingan/peran aktor melalui perumusan masalah	2.3 <i>Problematization</i>	Pengembangan infrastruktur desa wisata
			Pemasaran desa wisata
			Penguatan kelembagaan desa wisata
			Kerjasama kemitraan
	4. <i>Interessment</i> Tindakan yang dimunculkan aktor utama untuk meyakinkan aktor lain	2.4 <i>Interessment</i>	Pengembangan infrastruktur desa wisata
			Pemasaran desa wisata
			Penguatan kelembagaan desa wisata
			Kerjasama kemitraan
	5. <i>Enrollment</i> Pendelegasian wewenang dan penerimaan kepentingan para aktor	2.5 <i>Enrollment</i>	Pengembangan infrastruktur desa wisata
			Pemasaran desa wisata
			Penguatan kelembagaan desa wisata
			Kerjasama kemitraan
	6. <i>Inscription</i> Bentuk kesepakatan perjanjian dalam bentuk lisan/tertulis	2.6 <i>Inscription</i>	Pengembangan infrastruktur desa wisata
			Pemasaran desa wisata
			Penguatan kelembagaan desa wisata
			Kerjasama kemitraan
	7. <i>Speaker/delegative representative</i> Juru bicara atas nama aktor-aktor lain atau aktor yang	2.7 <i>Speaker/Delegative representative</i>	Pengembangan infrastruktur desa wisata
			Pemasaran desa wisata

	menjadi perwakilan dalam jaringan		Penguatan kelembagaan desa wisata
			Kerjasama kemitraan
	8. <i>Betrayal</i> Situasi ketika aktor melakukan penyimpangan terhadap perjanjian/kesepakatan	2.8 <i>Betrayal</i>	Pengembangan infrastruktur desa wisata
			Pemasaran desa wisata
			Penguatan kelembagaan desa wisata
			Kerjasama kemitraan
	9. <i>Irreversibility</i> Proses penciptaan alternatif untuk menyatukan kembali jaringan	2.9 <i>Irreversibility</i>	Pengembangan infrastruktur desa wisata
			Pemasaran desa wisata
			Penguatan kelembagaan desa wisata
			Kerjasama kemitraan

1.9.5 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan informasi yang bersifat fakta seperti pengukuran dan statistik, yang digunakan sebagai dasar penalaran, diskusi, atau perhitungan dalam penelitian ilmiah. Beberapa jenis data yang dipakai dalam penelitian kualitatif antara lain:

- 1) Data Tertulis, merupakan data yang berbentuk penjabaran atau penjelasan tertulis, yang didapatkan dari sumber tertulis seperti undang-undang, jurnal, buku, dan lainnya.

- 2) Data Numerik, yang disajikan dalam bentuk angka serta digital seperti persentase, kuantitas, frekuensi, rata-rata, dan lain-lain.
- 3) Data Tabel, merupakan data yang dipresentasikan dalam format tabel (ada baris dan kolom)
- 4) Data Gambar, adalah data yang disajikan dengan format berupa simbol, sketsa, bagan, peta, dan lain-lain.

Peneliti memakai kombinasi dari keempat jenis data di atas untuk menyajikan data yang dipakai pada penelitian ini, demi mendapatkan data yang relevan dan memudahkan peneliti dalam proses penelitian ini.

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu berasal dan berhasil didapatkan. Data dalam penelitian tentang jaringan aktor ini bersumber dari:

- 1) Data Primer. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari informan penelitian. Diperoleh dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan penelitian dalam pengembangan Desa Wisata Muncar Moncer. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti, langsung dari pihak yang berperan sebagai narasumber (sumber pertama) atau dari pihak yang berada di tempat objek penelitian dilakukan.
- 2) Data Sekunder. Data sekunder merujuk pada data dari sumber kedua atau studi pustaka melalui buku, jurnal, literatur, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Data ini merupakan penyempurnaan dari data-data yang sudah ada sebelumnya, dan tidak langsung didapatkan oleh

peneliti. Data sekunder berfungsi untuk mendukung data-data primer yang sebelumnya sudah didapatkan.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan strategis pada penelitian karena tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data merupakan kegiatan menemukan, menulis, dan penghimpunan informasi secara obyektif dan sesuai pengamatan atau wawancara yang dilakukan di lapangan. Teknik dalam penelitian ini menggunakan:

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan keterangan terkait topik penelitian dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara penanya dan penjawab, dengan menggunakan panduan wawancara (Hardani et al., 2020). Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara terstruktur dengan mempersiapkan instrumen penelitian berbentuk daftar pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian.

2) Observasi

Observasi berkenaan dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, di mana pengamatan tersebut tidak terbatas pada manusia tetapi juga aspek atau objek lain yang ada di wilayah penelitian. Observasi memiliki ciri yang lebih spesifik dibandingkan teknik pengumpulan data lainnya. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati perilaku dan mempelajari makna dari perilaku itu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan usaha mengumpulkan informasi berupa data sekunder seperti arsip, buku, teori, dan sumber-sumber hukum. Dokumentasi ini dilakukan untuk menyusun kerangka teori dan memperkuat bukti berdasarkan data yang diperoleh dari setiap instansi yang akan diteliti.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa teknik analisis data yang digunakan dalam data kualitatif yaitu analisis data dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan seperti berikut:

1) Kondensasi Data

Merupakan tahap yang merujuk pada pemilihan, penyederhanaan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mencakup keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi empiris lainnya. Kondensasi data digunakan untuk memilah data yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan topik penelitian.

2) Penyajian Data

Merupakan proses menyusun informasi-informasi yang digunakan sebagai pijakan dalam penarikan kesimpulan dan penyusunan saran. Data-data ini dapat disajikan dengan beberapa jenis penyajian seperti grafik, tabel, diagram, matriks, dan lainnya yang semuanya dirancang untuk menyatukan beberapa informasi agar mudah dipahami baik oleh penulis atau pembaca.

3) Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan tahap mengelompokkan (memisahkan dan mengatur) data ke dalam kelas yang relevan berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu. Data dikelompokkan sesuai dengan jenis informasi dalam proses penyajian laporan penelitian.

4) Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dirumuskan peneliti merupakan kesimpulan sementara yang dapat berubah kapan saja apabila tidak disertai dengan bukti atau data yang mendukung. Namun jika kesimpulan awal yang dirumuskan telah ditopang oleh bukti yang lengkap dan valid, maka kesimpulan dapat dikatakan sebagai sebuah kesimpulan yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Peneliti menggunakan *software* Atlas.ti sebagai alat bantu untuk mengelola, menganalisis dan memvisualisasikan data kompleks yang didapat dari proses pengumpulan data dari informan-informan yang bersangkutan.

1.9.8 Kualitas Data

Salah satu teknik yang digunakan untuk menguji kemurnian dan keaslian data adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang didapatkan. Tiga jenis dari teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknis, dan waktu.

- 1) Triangulasi sumber merupakan teknik untuk melihat keabsahan data menggunakan sumber lain yang telah diperoleh data sebelumnya.

- 2) Triangulasi teknis yaitu pengujian keabsahan data dengan cara pengecekan data terhadap sumber yang sama, tetapi melalui metode atau teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu adalah menguji keabsahan data yang didapatkan dalam waktu yang tidak sama, seperti menguji data dari sumber yang sama tetapi waktu berbeda.

Teknik yang digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber. Peneliti menguji keabsahan data melalui hasil wawancara dengan berbagai informan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Teknik triangulasi sumber ini dilakukan agar sumber yang didapatkan tidak hanya berasal dari pandangan atau pendapat satu informan saja, tetapi berasal dari sudut pandang atau pendapat informan yang berbeda-beda. Informan tersebut antara lain:

- 1) Pelaku UMKM & pemilik *homestay* Desa Muncar Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung sebagai pihak yang terdampak dari adanya Desa Wisata Muncar Moncer
- 2) Pemuda & Barista Desa Muncar Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung sebagai pihak yang terlibat aktif dalam kegiatan Desa Wisata Muncar Moncer
- 3) Wisatawan, sebagai pengunjung dan penikmat potensi serta fasilitas yang dimiliki oleh Desa Wisata Muncar Moncer.